

Narasi Konflik dan Fragmentasi Pengetahuan Masa Lalu dalam Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Pidie, Aceh

Conflict Narratives and the Fragmentation of Historical Knowledge in Education: A Case Study in Pidie District, Aceh

***Siti Ikramatoun¹, Fadlan Barakah²**

^{1,2}*Program Studi Sosiologi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*

*Email: siti.ikramatoun@usk.ac.id

Abstract

The way past conflict narratives are understood and taught plays a crucial role in reconciliation and peacebuilding efforts in post-conflict regions such as Aceh, Indonesia. However, the effectiveness of this process depends on how complex and sensitive historical knowledge is transmitted and internalized by key educational actors. This study aims to examine the depth, sources, and characteristics of historical knowledge about the Aceh conflict held by high school teachers and students in Pidie District. Employing a qualitative descriptive method, data were collected through in-depth interviews, passive classroom observation, and document analysis at MAN 1 Pidie. The findings reveal a significant knowledge gap. Teachers' understanding of the Aceh conflict tends to be fragmented, heavily reliant on personal experiences, and constrained by perceptions of limited formal teaching resources. As a result, students acquire minimal formal knowledge from school, often relying on informal sources—such as family narratives and digital media—whose validity is questionable. This knowledge gap hinders the development of students' critical understanding of the past and limits the potential of education as a transformative vehicle for peace. The study underscores the urgent need for systemic interventions, including curriculum reform, foundational capacity-building for teachers (content mastery and critical pedagogy), and the enhancement of students' critical literacy in navigating contested historical narratives.

Keywords: *Aceh conflict, conflict narratives, post-conflict education, teacher knowledge, student knowledge, Pidie*

Abstrak

Bagaimana narasi konflik masa lalu dipahami dan diajarkan memainkan peran krusial dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian di wilayah pasca-konflik seperti Aceh, Indonesia. Namun, efektivitasnya bergantung pada bagaimana pengetahuan tentang masa lalu yang kompleks dan sensitif ditransmisikan dan dipahami oleh aktor kunci dalam sistem pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedalaman, sumber, dan karakteristik pengetahuan guru dan siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Pidie mengenai narasi konflik Aceh. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi kelas partisipan pasif, dan analisis dokumen di MAN 1 Pidie, melibatkan guru mata pelajaran relevan (Sejarah, Sosiologi, PKN) dan siswa jurusan IPS. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Pengetahuan guru mengenai narasi konflik Aceh cenderung fragmentaris, sangat bergantung pada pengalaman personal, dan terkendala persepsi keterbatasan sumber ajar formal. Akibatnya, pengetahuan siswa yang diperoleh dari sekolah sangat minimal, mendorong mereka bergantung pada sumber informasi informal (narasi keluarga,

media digital) yang validitasnya diragukan. Kesenjangan ini menghambat pembentukan pemahaman kritis mengenai masa lalu (*critical understanding of the past*) dan efektivitas pendidikan untuk perdamaian. Studi ini menegaskan perlunya intervensi sistemik yang mencakup reformasi kurikulum, penguatan kapasitas fundamental guru (penguasaan materi & pedagogi kritis), serta pengembangan literasi kritis siswa dalam menavigasi narasi masa lalu.

Kata Kunci: *Konflik Aceh, Narasi Konflik, Pendidikan Pasca-Konflik, Pengetahuan Guru, Pengetahuan Siswa, Pidie*

A. Pendahuluan

Pemahaman terhadap masa lalu yang kompleks merupakan fondasi penting dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian di wilayah pascakonflik seperti Aceh, Indonesia (Averink 2013; Davies 2010; Smith and Vaux 2003). Dalam konteks pendidikan, narasi konflik historis berperan bukan hanya sebagai bahan ajar sejarah, tetapi juga sebagai medium reflektif untuk membentuk kesadaran kritis, memperkuat identitas kolektif, dan mencegah rekuperasi kekerasan (Elizabeth A Cole 2007; Gómez-Carrasco et al. 2022; Wagoner and Brescó 2016). Jika dihadirkan secara kontekstual dan multiperspektif, pendidikan dapat menjadi instrumen kunci dalam menginternalisasi nilai-nilai rekonsiliasi dan keadilan sosial (E. A. Cole 2007).

Aceh memiliki rekam jejak konflik bersenjata yang panjang dan kompleks (Aspinall 2009; Miller 2008b, 2008a; Putra 2018; Reid 2014; Usman 2003). Perjanjian Damai Helsinki tahun 2005 menjadi tonggak penting dalam transisi menuju tatanan pascakonflik, termasuk dalam sektor pendidikan. Dalam proses tersebut, pendidikan dilihat sebagai pilar utama dalam membangun perdamaian jangka panjang, memperbaiki trauma kolektif, dan mendorong kohesi sosial (Amin 2018; Trijono 2007, 2009). Sejumlah studi telah menggarisbawahi peran berbagai aktor dalam upaya rekonsiliasi, seperti keterlibatan ulama (Sahlan et al. 2019) dan penerapan program pendidikan perdamaian, meskipun tantangan dalam praktik dan struktur tetap menjadi persoalan mendasar (Zainal 2016; Zainal et al. 2021; Zainal, Yunus, and Fadli 2019).

Kendati demikian, di tengah maraknya studi tentang pendidikan pascakonflik di Aceh, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman

terhadap aspek fundamental: bagaimana narasi konflik Aceh itu sendiri dipahami, direpresentasikan, dan ditransmisikan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Secara khusus, masih minim kajian yang mengeksplorasi secara mendalam kedalaman, sumber, dan karakteristik pengetahuan tentang konflik Aceh yang dimiliki oleh guru dan siswa sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Penelusuran literatur memperlihatkan bahwa sebagian besar studi pendidikan di Aceh pasca konflik masih terfokus pada aspek mutu dan kualitas (Amin 2018; Jumaidi et al. 2024), atau rekonstruksi pasca konflik dan tsunami (Ibda et al. 2023; Srimulyani 2013), sementara analisis terhadap isi pengetahuan historis aktual dan cara narasi konflik diproduksi dalam ruang kelas justru nyaris absen. Padahal, pemahaman guru terhadap sejarah konflik sangat memengaruhi pendekatan pedagogis mereka dan konstruksi pengetahuan siswa akan berdampak langsung pada kesadaran kritis serta sikap mereka terhadap isu-isu sosial dan perdamaian (Horner et al. 2015; Lozano et al. 2023). Ketiadaan kajian yang menyentuh substansi pengetahuan ini berisiko menutupi problem krusial, seperti pemahaman yang fragmentaris atau dominasi narasi informal terkait konflik Aceh yang tidak terverifikasi, yang secara tidak langsung justru dapat menghambat pendidikan sebagai wahana transformatif untuk membangun rekonsiliasi dan daya tahan damai..

Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik bertujuan mengisi kesenjangan empiris tersebut dengan menjawab pertanyaan utama yaitu bagaimana narasi konflik Aceh dipahami oleh guru dan siswa di tingkat sekolah menengah di Kabupaten Pidie. Untuk menjawab hal tersebut, kajian ini difokuskan pada tiga aspek utama yaitu kedalaman pemahaman, sumber pengetahuan yang digunakan, serta bentuk-bentuk fragmentasi yang muncul dalam proses pembelajaran. Dengan mengambil lokasi di MAN 1 Pidie sebagai salah satu lokasi dengan signifikansi historis terkait konflik Aceh, penelitian ini menawarkan kontribusi empiris dan konseptual yang signifikan, terutama dalam menjelaskan tantangan transmisi narasi sejarah dalam konteks pascakonflik. Dengan menyajikan bukti empiris terperinci mengenai kesenjangan pemahaman, peran pengalaman personal versus sumber formal,

dan ketergantungan siswa pada sumber informal, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan berupa pemahaman mendalam mengenai tantangan nyata transmisi narasi konflik di tingkat mikro (kelas). Temuan studi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi formulasi kebijakan kurikulum, penguatan kapasitas guru, dan pengembangan strategi literasi sejarah kritis yang lebih adaptif terhadap konteks lokal Aceh.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Neuman 2014). Pendekatan ini dipandang tepat untuk memperoleh pemahaman mendalam dan gambaran rinci mengenai kedalaman, sumber, dan karakteristik pengetahuan yang dimiliki oleh guru dan siswa tentang narasi konflik Aceh dalam konteks pendidikan formal di lembaga pendidikan menengah atas Kabupaten Pidie. Fokus deskriptif memungkinkan eksplorasi nuansa pemahaman, persepsi, dan sumber pengetahuan informan secara naturalistik. Studi dilaksanakan di Kabupaten Pidie, Aceh, sebuah wilayah dengan signifikansi historis terkait berbagai fase konflik di Aceh. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pidie dipilih secara purposif sebagai lokasi penelitian utama, dengan pertimbangan kriteria seperti lokasi sekolah dalam bekas zona konflik, latar belakang pengalaman guru yang hidup di masa konflik, serta asal daerah siswa yang juga terdampak konflik. Informan penelitian direkrut melalui teknik *purposive sampling* (Cresswell 2015) guna memastikan kedalaman dan relevansi informasi. Informan kunci meliputi guru mata pelajaran Sejarah, Sosiologi, dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, serta akademisi yang memiliki keahlian dalam isu pendidikan dan perdamaian di Aceh. Seluruh informan terlibat secara sukarela setelah mendapatkan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan memberikan persetujuan tertulis (*informed consent*). Anonimitas dan kerahasiaan data informan dijaga selama proses penelitian dan pelaporan.

Pengumpulan data yang bertujuan menggali pengetahuan informan mengenai narasi konflik Aceh dilakukan melalui kombinasi beberapa teknik.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) menjadi instrumen utama untuk mengeksplorasi secara langsung pemahaman, persepsi, dan sumber informasi guru serta siswa tentang kronologi, penyebab, dampak, dan narasi umum konflik Aceh. Selain wawancara, observasi partisipan pasif (*passive participant observation*) di dalam kelas selama pembelajaran mata pelajaran terkait memberikan data kontekstual mengenai bagaimana pengetahuan tentang konflik disajikan dan diterima dalam interaksi belajar-mengajar. Proses pengumpulan data juga dilengkapi dengan analisis dokumen, seperti buku ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru, dan materi relevan lainnya yang tersedia di sekolah, guna mengidentifikasi sumber pengetahuan formal yang potensial terkait narasi konflik Aceh.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014). Proses analisis ini mencakup kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang berlangsung secara simultan dan berkelanjutan. Pendekatan analisis tematik induktif diterapkan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data terkait kedalaman, sumber, serta karakteristik pengetahuan guru dan siswa tentang konflik Aceh (Braun and Clarke 2023). Untuk meningkatkan keabsahan temuan, dilakukan triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan dan mengontraskan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara (perspektif subjektif informan), observasi (konteks praktik kelas), dan analisis dokumen (sumber formal yang tersedia) guna membangun pemahaman yang lebih kaya dan terverifikasi mengenai fenomena pengetahuan narasi konflik di sekolah tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan utama penelitian mengenai tingkat dan karakteristik pengetahuan guru serta siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Pidie tentang narasi konflik Aceh masa lalu. Sejalan dengan pendekatan integratif, setiap paparan hasil temuan akan diikuti secara langsung dengan analisis dan pembahasan kritis untuk menginterpretasikan makna temuan tersebut dalam konteks pendidikan pasca-konflik di Aceh dan kaitannya dengan

literatur serta kerangka teori yang relevan, guna mengungkap tantangan dan potensi dalam upaya membangun perdamaian berkelanjutan melalui pendidikan sejarah.

1. Pemahaman Guru: Antara Pengetahuan Terstruktur dan Fragmentaris tentang Sejarah Konflik Aceh

Temuan utama dari observasi kelas dan wawancara mendalam mengindikasikan heterogenitas yang signifikan dalam tingkat pemahaman guru di MAN 1 Pidie mengenai substansi dan narasi sejarah konflik Aceh. Meskipun observasi mencatat adanya satu guru yang dinilai mampu menyajikan narasi konflik secara relatif terstruktur dan kronologis – di mana “...dari urutan cerita yang disampaikan kepada siswa terlihat jelas bahwa guru tersebut memiliki pemahaman yang kuat...” – fenomena ini tampak sebagai anomali. Mayoritas guru yang terlibat dalam penelitian cenderung menampilkan pemahaman yang bersifat fragmentaris, episodik, atau menggunakan peristiwa konflik hanya sebagai ilustrasi singkat dalam konteks materi lain seperti hak asasi manusia (HAM), di mana fokusnya lebih pada penggunaan media, bukan pada analisis historis yang mendalam mengenai konteks dan kausalitas konflik itu sendiri. Pola ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang komprehensif dan terintegrasi mengenai sejarah kompleks konflik Aceh belum menjadi basis kognitif yang kokoh bagi sebagian besar guru dalam praktik pengajaran mereka.

Variasi pemahaman guru ini lebih dari sekadar perbedaan kapasitas individual; ia merefleksikan tantangan sistemik dalam pendidikan pasca-konflik di Aceh. Kesenjangan antara guru yang memiliki pemahaman terstruktur dengan mayoritas yang pemahamannya fragmentaris secara fundamental menghambat tujuan pendidikan perdamaian yang transformatif. Narasi masa lalu yang disajikan secara episodik atau sekadar contoh kasus, tanpa analisis mendalam mengenai akar penyebab, dinamika kekuasaan, dan dampak struktural jangka panjang, berisiko gagal menumbuhkan pemahaman kritis mengenai masa lalu (*critical understanding of the past*) pada level yang memadai (Elizabeth A Cole 2007; Muwaffaq 2018). Padahal, pemahaman pada level inilah yang diperlukan untuk memungkinkan generasi muda memahami masa lalu

secara mendalam, melakukan rekonsiliasi yang bermakna, dan secara aktif mencegah keberulangan kekerasan. Pembelajaran yang dihasilkan dari pengetahuan fragmentaris cenderung bersifat superfisial, lebih fokus pada fakta-fakta lepas daripada membangun pemahaman kausalitas dan interpretasi kritis.

Kondisi ini juga mengindikasikan adanya kompleksitas 'agensi guru' (*teacher agency*) dalam konteks Aceh. Kapasitas guru untuk bertindak sebagai agen perubahan atau fasilitator dialog kritis mengenai masa lalu yang sensitif tampak dibatasi oleh penguasaan materi yang belum memadai. Kompleksitas ini diperkuat oleh rasa 'tidak nyaman' atau 'kekhawatiran' yang diekspresikan sebagian guru terkait sensitivitas topik bagi siswa yang mungkin memiliki keterkaitan personal dengan konflik. Seperti diungkapkan oleh salah seorang guru:

“Dibutuhkan kehati-hatian dalam menyampaikan fakta sejarah tentang konflik Aceh karena ada banyak siswa kita yang dulu keluarganya menjadi bagian konflik dan korban konflik, jadi ini agak riskan” (Wawancara Guru Sejarah, Agustus 2023).

Kekhawatiran yang valid secara personal ini, jika tidak diimbangi dengan dukungan pengetahuan dan strategi pedagogis yang memadai, dapat secara tidak sengaja berkontribusi pada penghindaran pembahasan mendalam dan melanggengkan 'kesenyapan kurikuler' atau *curricular silence* (Alerby 2020; Römhild 2024) mengenai aspek-aspek krusial dari narasi konflik. Temuan ini memberikan bukti empiris penting dari Kabupaten Pidie, Aceh yang menggarisbawahi urgensi intervensi yang tidak hanya fokus pada penyediaan materi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas analitis dan pedagogis guru untuk mengelola diskusi tentang masa lalu yang sulit secara konstruktif dan kritis (Horner et al. 2015; Lozano et al. 2023). Tanpa pemahaman guru yang kuat dan kritis, peran sentral mereka dalam membangun perdamaian melalui pendidikan menjadi sulit diwujudkan secara optimal (Sayed and Novelli 2015).

2. Dominasi Pengalaman Pribadi dan Persepsi Keterbatasan Sumber dalam Pengetahuan Guru

Temuan kajian ini juga memperlihatkan adanya ketergantungan yang kuat pada pengalaman pribadi sebagai sumber utama pengetahuan guru dalam

menyampaikan narasi konflik Aceh. Guru secara eksplisit menyatakan bahwa praktik pengajaran mereka sering kali didasarkan pada apa yang mereka alami atau saksikan secara langsung sebagai masyarakat Aceh yang hidup di masa konflik, bukan pada sumber tekstual formal. Seorang guru sejarah menegaskan hal ini:

“Pembahasan sejarah Aceh berdasarkan pengalaman yang terjadi di sekitar kita, tidak berdasarkan buku. Namun penting menjelaskan pelajaran sejarah konflik Aceh sesuai dengan apa yang dialami oleh masyarakat.” (Wawancara Guru Sejarah, Agustus 2023).

Ketergantungan pada pengalaman ini berjalan paralel dengan persepsi kuat di kalangan guru mengenai kelangkaan sumber belajar formal yang spesifik membahas konflik Aceh secara mendalam (Hasil Wawancara, Agustus 2023). Diungkapkan bahwa buku ajar yang tersedia hanya menyentuh topik ini secara minimal, dan tidak ada modul atau rujukan khusus. Seorang guru menyatakan:

“Bahan Ajar sangat kurang untuk sejarah konflik Aceh. Tidak ada rujukan khusus untuk memasukkan topiknya di RPP” (Wawancara Guru Sejarah, Agustus 2023).

Persepsi ini diperkuat dengan temuan bahwa modul spesifik tentang konflik Aceh memang sulit ditemukan atau belum tersedia di perpustakaan madrasah.

Dominasi pengalaman personal sebagai basis pengetahuan guru ini menghadirkan dilema pedagogis yang kompleks, sebuah fenomena yang resonansinya dapat ditemukan dalam kajian pendidikan di wilayah pasca-konflik lainnya. Di satu sisi, pemanfaatan pengalaman hidup (*lived experience*) dapat memberikan autentisitas dan relevansi emosional, sejalan dengan beberapa pendekatan pedagogis yang menekankan pentingnya menghubungkan materi ajar dengan dunia kehidupan siswa. Namun, sebagaimana diperingatkan secara luas dalam literatur pendidikan konflik (misalnya, Cole, 2007; Smith & Vaux, 2003), ketergantungan berlebih pada narasi personal dalam konteks sejarah yang penuh kekerasan dan kontestasi sangat berisiko. Pengalaman individu, meskipun otentik, secara inheren bersifat parsial, sering kali episodik, dan subjektif, sehingga rentan terhadap bias, penyederhanaan berlebih, dan bahkan dapat secara tidak sengaja mereproduksi narasi yang memecah belah atau melanggengkan trauma jika tidak dikelola

dalam kerangka analisis kritis yang memadai. Temuan di Pidie ini mengkonfirmasi tantangan tersebut dan menunjukkan bahwa potensi pedagogis pengalaman personal tampaknya belum diimbangi dengan kapasitas guru untuk menempatkannya dalam perspektif historis yang lebih luas, kritis, dan multiperspektif, sebagaimana yang diidealkan dalam tujuan rekonsiliasi melalui pemahaman masa lalu (Cole, 2007).

Lebih lanjut, persepsi guru mengenai kelangkaan sumber ajar formal – meskipun faktual di tingkat mikro sekolah – menjadi semakin problematis jika dikonfrontasikan dengan ketersediaan sumber eksternal dan dibandingkan dengan tantangan serupa dalam literatur. Kondisi ini mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai ‘paradoks sumber daya’, sebuah kesenjangan antara potensi sumber daya pengetahuan dengan praktik aktual di lapangan yang sering kali menandai sistem pendidikan di negara berkembang atau area pasca-konflik (Hossain and Hickey 2019).

Melimpahnya literatur akademis, non-akademis, dan sumber digital mengenai konflik Aceh menunjukkan bahwa ‘kelangkaan’ yang dirasakan guru bisa jadi lebih merupakan manifestasi dari isu struktural lain seperti keterbatasan aksesibilitas sumber, kurangnya investasi dalam pengembangan profesionalisme guru (termasuk literasi informasi dan kemampuan riset mandiri), atau budaya institusional sekolah yang cenderung terpaku pada buku teks standar.

Temuan Suadi et al. (2018; 2021) tentang tantangan implementasi pendidikan perdamaian di Aceh, misalnya, juga mengisyaratkan adanya kendala kapasitas dan dukungan sistemik. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keterbatasan sumber di tingkat guru, tetapi juga secara implisit menegaskan argumen literatur mengenai kebutuhan mendesak untuk intervensi yang bersifat sistemik guna meningkatkan kapasitas guru dalam mengakses, mengevaluasi, dan mengintegrasikan beragam sumber pengetahuan ke dalam pengajaran narasi konflik Aceh, melampaui keterpakuan pada buku teks standar atau pengalaman personal semata.

3. Kesenjangan Pengetahuan Historis Siswa tentang Konflik Aceh dari Pendidikan Formal

Beranjak pada pengetahuan siswa, temuan konsisten dari wawancara dan diskusi kelas menunjukkan adanya kesenjangan signifikan terkait pemahaman sejarah konflik Aceh yang diperoleh melalui jalur pendidikan formal. Siswa dari jurusan IPS, yang seharusnya paling banyak terpapar materi sosial-historis, secara terbuka mengakui bahwa kurikulum yang mereka jalani, termasuk mata pelajaran kunci seperti Sejarah, Sosiologi, dan PKN, belum memberikan porsi atau eksposur yang memadai terhadap peristiwa-peristiwa penting selama konflik Aceh. Informasi yang diterima di kelas dilaporkan sangat terbatas, mengakibatkan pengetahuan siswa mengenai topik ini sering kali bersifat dangkal, sepotong-sepotong, dan tidak komprehensif. Kondisi ini tampak jelas dari pengakuan siswa yang sering kali hanya pada level “sekedar tahu”, sementara pemahaman yang lebih mendalam mengenai kronologi, latar belakang kausalitas, aktor, maupun kompleksitas narasi konflik Aceh secara umum sangat kurang (Hasil Wawancara, Agustus 2023). Ironisnya, data wawancara juga mengindikasikan bahwa keingintahuan siswa mengenai aspek sejarah konflik terkadang justru lebih terpicu oleh peristiwa kontemporer yang diberitakan media massa—seperti diskursus publik mengenai kunjungan Presiden ke situs sejarah Rumah Gedong (rumah yang pernah menjadi tempat penyiksaan pada masa konflik)—daripada oleh stimulasi atau pembahasan terstruktur yang berasal dari dalam ruang kelas formal.

Kesenjangan pengetahuan historis siswa yang bersumber dari pendidikan formal ini secara logis merupakan konsekuensi langsung dari keterbatasan yang telah diidentifikasi pada kapasitas guru dan sumber belajar formal pada bagian sebelumnya. Kegagalan siswa memperoleh pemahaman yang memadai dari sekolah mencerminkan masalah pada level *implemented curriculum* (kurikulum yang dilaksanakan guru) dan *received curriculum* (kurikulum yang diterima siswa), yang tampaknya jauh dari cita-cita *intended curriculum* (kurikulum yang diharapkan) dalam konteks pendidikan perdamaian pasca-konflik Aceh. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang mengkaji tantangan

implementasi kurikulum sejarah atau pendidikan perdamaian di wilayah pasca-konflik. Misalnya, studi Suadi et al., (2019) mengenai kendala di Aceh Timur dan studi Smith & Vaux (2003) mengenai tantangan umum pendidikan dalam konteks konflik, di mana niat baik kebijakan sering kali tidak berhasil diterjemahkan menjadi praktik kelas yang efektif dan bermakna bagi siswa. Kesenjangan ini juga mengindikasikan potensi kegagalan dalam memanfaatkan otonomi atau keleluasaan kurikulum untuk mengintegrasikan muatan lokal yang krusial bagi pemahaman identitas dan sejarah siswa (Banks 2017; Tarozzi and Torres 2016).

Implikasi dari minimnya input formal ini sangat serius bagi pembentukan generasi muda Aceh. Pendidikan formal kehilangan momentum krusial untuk secara sistematis membina pemahaman kritis mengenai masa lalu (*critical understanding of the past*) yang reflektif (Barton and Levstik 2004). Ketika sekolah gagal menyediakan narasi yang koheren, berbasis bukti, dan multiperspektif mengenai masa lalu yang signifikan dan traumatis, siswa dibiarkan dengan pemahaman yang rapuh, fragmentaris, dan rentan terhadap narasi-narasi simplistik atau bahkan menyesatkan yang mungkin mereka temui di luar sekolah. Kondisi 'sekedar tahu' ini tidak cukup untuk membekali mereka dengan alat analisis guna memahami akar konflik, dinamika kekerasan, maupun proses perdamaian yang kompleks, sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan terinformasi dalam upaya merawat perdamaian.

Lebih jauh, kegagalan pendidikan formal ini secara tidak langsung mendorong siswa untuk mencari sumber informasi alternatif—seperti akan dibahas pada bagian selanjutnya—yang sering kali tidak terverifikasi dan berpotensi bias, sebuah fenomena yang relevan dalam studi memori antar generasi (Wagoner and Brescó 2016). Ini merupakan sebuah ironi, mengingat potensi besar pendidikan formal untuk menjadi wahana utama dalam transmisi pengetahuan historis yang akurat, etis, dan berorientasi pada perdamaian, sebuah potensi yang tampaknya belum teraktualisasi secara optimal di konteks sekolah menengah atas yang diteliti di Pidie, dan secara krusial, kondisi ini

‘memaksa’ siswa mencari pemahaman di arena informasi lain yang kurang terstruktur dan potensial berisiko.

4. Sumber Informal dan Sikap terhadap Perdamaian: Respons Siswa di Luar Kelas

Sebagai konsekuensi logis dari terbatasnya paparan materi konflik Aceh di sekolah, penelitian ini menemukan bahwa siswa secara aktif mencari atau menerima informasi mengenai konflik tersebut melalui sumber-sumber informal. Banyak siswa mengakui bahwa pengetahuan mereka, meskipun fragmentaris, sebagian besar justru terbentuk dari cerita yang disampaikan oleh orang tua atau anggota keluarga lain yang hidup pada masa konflik, serta melalui pencarian informasi mandiri di internet, termasuk platform video seperti YouTube (Hasil Wawancara Siswa, Agustus 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya upaya mandiri siswa untuk mengisi kekosongan informasi yang tidak disediakan oleh lembaga pendidikan formal.

Di sisi lain, terlepas dari keterbatasan pengetahuan historis formal mereka, temuan yang sangat signifikan adalah sikap siswa yang secara konsisten positif terhadap perdamaian dan pentingnya mempelajari sejarah konflik. Hampir semua siswa yang terlibat dalam diskusi menyatakan persetujuan bahwa sejarah konflik Aceh adalah bagian integral yang perlu dipelajari dan dipahami oleh generasi mereka. Mereka secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan pembelajaran sejarah ini bukan untuk membangkitkan permusuhan baru, melainkan justru untuk “memahami dan merawat perdamaian” yang kini mereka nikmati. Sikap ini menunjukkan adanya orientasi masa depan yang damai dan kesadaran akan nilai perdamaian di kalangan generasi muda ini. Meskipun demikian, perlu dicatat pula bahwa beberapa siswa mengungkapkan adanya rasa terbatas atau bahkan takut untuk bertanya lebih jauh atau mencari informasi secara mendalam karena topik konflik masih dianggap sangat sensitif oleh orang tua atau lingkungan keluarga mereka.

Kecenderungan siswa untuk beralih ke sumber informal ini menunjukkan adanya agensi dan keingintahuan intrinsik untuk memahami masa lalu mereka, sebuah potensi yang seharusnya dapat ditangkap dan dikembangkan oleh

sistem pendidikan formal. Namun, ketergantungan pada sumber informal, khususnya narasi keluarga dan konten digital yang tidak terkurasi, membawa risiko yang signifikan terhadap kualitas dan objektivitas pemahaman historis. Sebagaimana ditekankan dalam studi memori sosial dan transmisi antar generasi (misalnya, Wagoner & Brescó, 2016), narasi keluarga dapat mewariskan perspektif yang sangat partikularistik, bermuatan emosi, bias, atau bahkan traumatis tanpa filter kritis. Demikian pula, informasi dari internet sering kali tidak terverifikasi, rentan terhadap misinformasi, polarisasi, atau manipulasi naratif yang disengaja. Dalam konteks ini, pendidikan formal sejatinya memiliki peran krusial yang saat ini tampak belum terpenuhi, yaitu membekali siswa dengan kompetensi literasi kritis—baik literasi sejarah (kemampuan menganalisis sumber, konteks, dan perspektif) maupun literasi media/digital—agar mereka mampu menavigasi lanskap informasi yang kompleks ini secara cerdas dan bertanggung jawab.

Kontras antara keterbatasan pengetahuan kognitif siswa tentang detail sejarah konflik dengan sikap afektif mereka yang kuat mendukung perdamaian menghadirkan sebuah dinamika yang menarik sekaligus kompleks. Sikap pro-perdamaian ini jelas merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi masa depan Aceh. Namun, jika sikap ini tidak didukung oleh pemahaman historis yang kuat mengenai akar masalah, kompleksitas kekerasan, dan tantangan rekonsiliasi, ada risiko bahwa komitmen terhadap perdamaian mungkin bersifat rapuh atau kurang memiliki daya tahan ketika dihadapkan pada potensi konflik atau manipulasi naratif di masa depan. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam literatur pendidikan perdamaian yang menekankan pentingnya basis pengetahuan (domain kognitif) sebagai fondasi untuk membangun sikap dan perilaku damai yang berkelanjutan (Bar-tal 2002). Pendidikan perdamaian yang efektif idealnya mengintegrasikan domain kognitif (pengetahuan), afektif (sikap/nilai), dan perilaku (keterampilan) secara seimbang (Bajaj and Chiu 2009).

Temuan di Pidie ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan, di mana domain afektif tampak positif, namun domain kognitif yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama sekolah formal justru lemah. Hal ini menggarisbawahi

peluang sekaligus tanggung jawab besar bagi lembaga pendidikan di Aceh: untuk membangun di atas fondasi sikap pro-perdamaian siswa dengan cara menyediakan pembelajaran narasi konflik yang akurat, kritis, empatik, dan relevan. Selain itu, perlu diciptakan ruang dialog yang aman di sekolah untuk membahas isu-isu sensitif, sehingga kekhawatiran siswa untuk bertanya dapat diatasi dan sikap damai mereka memiliki akar pemahaman historis yang kokoh dan kritis, sebuah peran edukatif yang saat ini tampak diambil alih oleh ranah informal karena kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem pendidikan formal.

Berdasarkan tiga temuan di atas, analisis terhadap pengetahuan guru dan siswa terkait narasi konflik Aceh di lembaga pendidikan menengah atas Kabupaten Pidie ini mengungkap sebuah dinamika yang problematis dan sarat dengan tantangan bagi upaya pembangunan perdamaian berkelanjutan melalui pendidikan. Temuan-temuan yang dipaparkan di bawah subjudul-subjudul sebelumnya secara kolektif menunjukkan adanya diskoneksi yang signifikan antara idealisme peran pendidikan sebagai wahana transmisi pengetahuan historis kritis dengan realitas praktik di lapangan. Di satu sisi, teridentifikasi adanya variasi pemahaman di kalangan guru, namun dengan kecenderungan dominan pada pengetahuan yang fragmentaris, sangat bergantung pada pengalaman personal yang subjektif, serta terkendala oleh persepsi kelangkaan sumber daya formal—sebuah persepsi yang, seperti telah didiskusikan, mungkin menutupi isu kapasitas dan aksesibilitas sumber eksternal yang lebih dalam. Di sisi lain, terdapat siswa, generasi pasca-konflik, yang melaporkan penerimaan input pengetahuan formal yang minimal dan dangkal mengenai masa lalu daerahnya, sebuah kondisi yang mendorong mereka untuk mengonstruksi pemahaman melalui sumber-sumber informal yang validitasnya sering kali diragukan.

Dinamika yang teridentifikasi ini – interaksi antara keterbatasan kapasitas guru dalam menyajikan narasi konflik secara mendalam dan kritis dengan minimnya paparan formal yang diterima siswa – menciptakan sebuah lingkaran persoalan yang menghambat pembentukan kesadaran sejarah yang kokoh dan berorientasi pada perdamaian. Meskipun sikap positif siswa terhadap

perdamaian merupakan modal sosial yang penting, temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa sikap tersebut belum tentu ditopang oleh pemahaman kognitif yang memadai mengenai kompleksitas sejarah konflik – sebuah fondasi yang, menurut literatur (misalnya, Cole, 2007b; Bar-Tal, 2002), krusial untuk resiliensi perdamaian jangka panjang dan rekonsiliasi yang bermakna. Kegagalan sistem pendidikan formal dalam membekali guru dan siswa dengan pengetahuan historis yang akurat, multiperspektif, dan kritis, serta keterampilan literasi informasi yang esensial di era digital, bukan hanya sekadar isu pedagogis semata. Hal ini berimplikasi langsung pada kualitas diskursus publik tentang masa lalu, potensi reproduksi narasi konfliktual atau simplistik, dan pada akhirnya, kapasitas generasi mendatang untuk secara aktif, terinformasi, dan kritis terlibat dalam upaya merawat serta memperkuat perdamaian Aceh. Oleh karena itu, mengatasi kesenjangan pengetahuan historis yang terdokumentasi secara empiris dalam studi ini – melalui intervensi yang menyentuh kurikulum, penguatan kapasitas guru secara fundamental (tidak hanya teknis, tetapi juga analitis dan kritis), serta penciptaan ekosistem pembelajaran yang lebih terbuka dan dialogis – menjadi sebuah keharusan mendesak jika pendidikan di Aceh benar-benar ingin berkontribusi secara transformatif pada masa depan yang lebih adil dan damai.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan pengetahuan historis yang signifikan dan problematis mengenai konflik Aceh pada guru dan siswa di sekolah menengah atas Kabupaten Pidie. Pengetahuan guru yang cenderung fragmentaris dan sangat bergantung pada pengalaman pribadi ditemukan berkorelasi langsung dengan minimnya pemahaman siswa yang bersumber dari pendidikan formal. Dinamika ini secara serius menghambat upaya pembentukan kesadaran sejarah kritis (*critical historical consciousness*) dan mengurangi efektivitas pendidikan sebagai wahana perdamaian yang transformatif di wilayah pasca-konflik. Studi ini memberikan kontribusi empiris penting dengan memetakan secara spesifik natur dari kesenjangan pengetahuan ini dalam konteks Pidie, sekaligus menyoroti adanya diskoneksi antara cita-cita

ideal pendidikan pasca-konflik dengan realitas kapasitas sistemik dan praktik pedagogis di lapangan. Penting untuk memaknai temuan ini dalam konteks keterbatasan inheren studi kualitatif yang berfokus pada satu wilayah geografis.

Menindaklanjuti temuan ini, beberapa implikasi praktis dan rekomendasi strategis perlu dipertimbangkan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan yang teridentifikasi. Prioritas utama adalah penguatan kapasitas guru secara fundamental melalui program pengembangan profesional berkelanjutan yang komprehensif, mencakup tidak hanya penguasaan materi sejarah konflik Aceh yang akurat dan multiperspektif, tetapi juga kompetensi pedagogi kritis untuk mengajar topik sensitif serta literasi informasi untuk mengevaluasi beragam sumber. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan dan diseminasi modul ajar spesifik yang berkualitas. Pada level kurikulum dan pembelajaran, narasi konflik Aceh perlu diintegrasikan secara lebih eksplisit dan sistematis, dengan fokus pada pengembangan kemampuan analisis kritis siswa terhadap semua jenis sumber informasi, termasuk yang berasal dari ranah informal dan digital. Dukungan kebijakan institusional juga krusial untuk memfasilitasi akses sumber belajar yang lebih luas bagi guru dan menciptakan iklim sekolah sebagai ruang aman untuk dialog konstruktif mengenai masa lalu.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Syiah Kuala dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan pendanaan dalam pelaksanaan penelitian ini melalui Skema Penelitian Asisten Ahli Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Kontrak Nomor: 416/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023. Penulis juga mengatur apresiasi kepada seluruh informan dan pihak MAN 1 Pidie yang telah berpartisipasi dan memberikan data penting bagi kelancaran penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Alerby, Eva. 2020. "The Significance of Silence in Pedagogical Settings." Pp. 43-50 in *Silence within and beyond Pedagogical Settings*. Cham: Springer International Publishing.
- Amin, Khairul. 2018. "Pengaruh Konflik Terhadap Pembangunan Pendidikan Di Aceh." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 1(2):159-76. doi: 10.31538/nzh.v1i2.45.
- Aspinall, Edward. 2009. "Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh." *Indonesia* (87):1-34.
- Averink, Marijke. 2013. "Education for Sustainable Peace: The Role of Education in the Aftermath of Ethnic Conflict." University of Utrecht.
- B. Miles, Matthew, A. Michale Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis Data: A Methods Sourcebook*. Edition 3. United Kingdom: Sage.
- Bajaj, Monisha, and Belinda Chiu. 2009. "Education for Sustainable Development as Peace Education." *Peace & Change* 34(4):441-55. doi: 10.1111/j.1468-0130.2009.00593.x.
- Banks, James A. 2017. "Citizenship Education and Global Migration: Implications for Theory, Research, and Teaching." *American Educational Research Association (AERA)* 528.
- Bar-tal, Daniel. 2002. "The Elusive Nature of Peace Education." Pp. 27-36 in *Peace education: The concept, principles, and practices around the world*, edited by G. Salomon and B. Nevo.
- Barton, Keith C., and Linda S. Levstik. 2004. *Teaching History for the Common Good*. Routledge.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. 2023. "Toward Good Practice in Thematic Analysis: Avoiding Common Problems and Be(Com)Ing a Knowing Researcher." *International Journal of Transgender Health* 24(1):1-6. doi: 10.1080/26895269.2022.2129597.
- Cole, E. A. 2007. "Transitional Justice and the Reform of History Education." *International Journal of Transitional Justice* 1(1):115-37. doi: 10.1093/ijtj/ijm003.
- Cole, Elizabeth A, ed. 2007. *Teaching the Violent Past: History Education and Reconciliation*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Cresswell, John W. 2015. "Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Davies, Lynn. 2010. "The Different Faces of Education in Conflict." *Development* 53(4):491-97. doi: 10.1057/dev.2010.69.
- Gómez-Carrasco, Cosme J., Jairo Rodríguez-Medina, Ramón López-Facal, and José Monteagudo-Fernández. 2022. "A Review of Literature on History Education: An Analysis of the Conceptual, Intellectual and Social Structure

- of a Knowledge Domain (2000–2019).” *European Journal of Education* 57(3):497–511. doi: 10.1111/ejed.12508.
- Horner, Lindsey, Laila Kadiwal, Yusuf Sayed, Angeline Barrett, Naureen Durrani, and Mario Novelli. 2015. “Research Consortium on Education and Peacebuilding - Literature Review: The Integration of Education and Peacebuilding.” P. 39 in *Research Consortium on Education and Peacebuilding* - .
- Hossain, Naomi, and Sam Hickey. 2019. “The Problem of Education Quality in Developing Countries.” Pp. 1–21 in *The Politics of Education in Developing Countries*. Oxford University PressOxford.
- Ibda, Hamidulloh, Aji Sofanudin, Moh. Syafi’, Mumtazul Fikri, and Marzuki Marzuki. 2023. “Network Of Islamic Education Ideology in Aceh Islamic Boarding Schools: A Systematic Literature Review.” *At-Turats* 17(1):68–90. doi: 10.24260/at-turats.v17i1.2801.
- Jumaidi, Agus, Mustanir Mustanir, T. Rusli Yusuf, and Sanusi Sanusi. 2024. “Political Study Analyses of Education Policy to Improve Education Quality.” *Emerging Science Journal* 8(4):1420–39. doi: 10.28991/ESJ-2024-08-04-011.
- Lozano, Monica, Mario Mendoza Toraya, Daniela Montaña, and Rodrigo Parra Sandoval. 2023. “Participatory Research, Biographical Narratives and Peacebuilding: An Experience with Teachers in Tolima, Colombia.” *Teaching and Teacher Education* 125:104054. doi: 10.1016/j.tate.2023.104054.
- Miller, Michelle Ann. 2008a. *Rebellion and Reform in Indonesia: Jakarta’s Security and Autonomy Policies in Aceh*.
- Miller, Michelle Ann. 2008b. “The Conflict in Aceh: Context, Precursors and Catalysts | Conciliation Resources.” in *Accord: Aceh-Indonesia*.
- Muwaffaq, Thafhan. 2018. “Introspeksi Masa Lalu Terfragmentasi Dan Narasi Bermoda Percakapan Dalam Yang Sudah Hilang Oleh Pramodya Ananta Toer.” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4(3):171. doi: 10.36722/sh.v4i3.275.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America: Pearson.
- Putra, Eka Vidya. 2018. “Money Politics Dalam Penyelengaran Pemilihan Umum Di Kota Pariaman.” *SOCIUS* 4(1):1. doi: 10.24036/scs.v4i1.19.
- Reid, Anthony. 2014. *The Blood of the People*. NUS Press Pte Ltd.
- Römhild, Ricardo. 2024. “THE SOUND OF CURRICULAR SILENCE: A CRITICAL REVIEW OF GERMANY’S FOREIGN LANGUAGE CURRICULUM.” *Policy and Practice* 2024-Autum(39):101–16.
- Sahlan, Muhammad, Suci Fajarni, Siti Ikramatoun, Ade Ikhsan Kamil, and Iromi Ilham. 2019. “The Roles of Ulama in the Process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh.” *Society* 7(2):251–67. doi: 10.33019/society.v7i2.106.

- Sayed, Yusuf, and Mario Novelli. 2015. "The Crucial Role of Teachers in Peacebuilding." *Global Partnership for Education*. Retrieved November 19, 2023 (<https://www.globalpartnership.org/blog/crucial-role-teachers-peacebuilding>).
- Smith, Alan, and Tony Vaux. 2003. *Education, Conflict and International Development*. UK.
- Srimulyani, Eka. 2013. "Islamic Schooling in Aceh: Change, Reform, and Local Context." *Studia Islamika* 20(3):467-87. doi: 10.15408/sdi.v20i3.513.
- Suadi, Saifuddin, and Fadli. 2018. "Incorporating Peace Education into Aqidah Akhlak Subject in East Aceh." *Emerald Reach Proceedings Series* 1:467-72. doi: 10.1108/978-1-78756-793-1-00013/FULL/EPUB.
- Tarozzi, Massimiliano, and Carlos Alberto Torres. 2016. *Global Citizenship Education and the Crises of Multiculturalism*. Bloomsbury Publishing Plc.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Trijono, Lambang. 2009. "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik Di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan Dan Demokrasi Dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13(1):48-70.
- Usman, Abdul Rani. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi Dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wagoner, Brady, and Ignacio Brescó. 2016. "Conflict and Memory: The Past in the Present." *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 22(1):3-4. doi: 10.1037/pac0000147.
- Zainal, Suadi. 2016. *Post-Conflict Peace Education to Build Sustainable Positive Peace in Aceh*. Vol. 6.
- Zainal, Suadi, Saifuddin Yunus, Fadli Jalil, and Aizat Khairi. 2021. "The Policy of Local Government to Implement Peace Education at Secondary School Post Armed Conflict in Aceh Indonesia." *Journal of Social Studies Education Research* 12(2):377-409.
- Zainal, Suadi, Saifuddin Yunus, and Fadli. 2019. *PENDIDIKAN PERDAMAIAN: Model Pembelajaran, Tantangan Dan Solusinya*. Banda Aceh: Bandar Publishing.